

Sektor Unggulan dan Kemiskinan di Provinsi Aceh

Agnes Vera Yanti Sitorus¹ dan Lidya Putri Utami^{2*}

¹ Badan Pusat Statistik

² Badan Pusat Statistik

Korespondensi: [*utami.lidya@bps.go.id](mailto:utami.lidya@bps.go.id)

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i2.209> | halaman: 223 – 239

Dikirim: 28-02-2023 | Diterima: 13-07-2023 | Dipublikasikan: 31-07-2023

Abstrak

Proses pemulihan ekonomi pasca konflik Aceh dan bencana alam tsunami tahun 2004 masih menyisakan tingkat kemiskinan yang tinggi dibanding provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Susenas Maret 2022 dan September 2022 menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh masing-masing mencapai 14,64 persen dan 14,75 persen. Pertumbuhan ekonomi, provinsi Aceh cenderung stagnan di sekitar 4 persen. Merujuk pada tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, tak terkecuali di Aceh, penanganan kemiskinan mestinya menjadi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi permasalahan serta potensi pemecahan masalah kemiskinan di Aceh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di Provinsi Aceh, permasalahan tenaga kerja, serta permasalahan ekonomi dan sosial lainnya yang menghambat pengentasan kemiskinan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bappenas. Metode penelitian adalah analisis Tabel *Input-Output* Aceh 2016 untuk mengidentifikasi potensi ekonomi serta melakukan simulasi pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrim Aceh dapat dikurangi secara signifikan mulai tahun 2033 hanya jika tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh dapat mencapai 5 persen setiap tahun, *ceteris paribus*. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperbaiki iklim investasi, memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kinerja sektor unggulan. Sektor-sektor unggulan di provinsi Aceh antara lain industri makanan dan minuman, industri kimia farmasi dan obat tradisional, kelistrikan, dan konstruksi. Secara umum, industri pengolahan merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding sektor lainnya di Provinsi Aceh. Pengembangan industri pengolahan khususnya subsektor unggulan, diharapkan dapat menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Merujuk pada struktur perekonomian Aceh dan sektor unggulan Aceh, industri yang bisa dikembangkan merupakan industri yang berbasis pertanian.

Kata kunci: kemiskinan; sektor unggulan; tabel *Input-Output* Aceh.

I. Pendahuluan

Proses pemulihan ekonomi pasca konflik Aceh dan bencana alam tsunami tahun 2004 masih menyisakan tingkat kemiskinan yang resisten tinggi dibanding provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Susenas Maret 2022 dan September 2022 menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh masing-masing mencapai 14,64 persen dan 14,75 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan Maret 2021 sebesar 15,33 persen dan September 2021 sebesar 15,53 persen. Walaupun tercatat menurun, tingkat kemiskinan di Aceh masih tetap tertinggi diantara provinsi lainnya di Sumatera. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, provinsi Aceh cenderung tumbuh stagnan di sekitar 4 persen. Konsumsi rumah tangga menyumbang share tertinggi dalam postur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sisi pengeluaran sekitar 53,77 persen tahun 2022. Tercatat konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 2022 mencapai 21,05 juta per kapita per tahun atau 1,75 juta per bulan, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 1,66 juta per bulan. Di sisi lain, garis kemiskinan daerah perkotaan sebesar 606.394 per kapita per bulan (Susenas Maret 2022).

Salah satu upaya mengurangi kemiskinan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketimpangan pendapatan (World Bank, 2004). Menurut teori Solow, modal merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari PDRB sisi pengeluaran tahun 2022, *share* Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 31,64 persen. Data investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara kumulatif triwulan IV tahun 2022 mencatat PMDN realisasi 4.424,2 miliar rp (3.811 proyek) dan PMA realisasi 127,6 juta US\$ (172 proyek). Hal ini sejalan dengan teori Rostow bahwa upaya tinggal landas dalam konsep pembangunan perlu adanya investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nchake dan Shuaibu (2022) infrastruktur di sektor *Information, Communication, and Technology* (ICT) berdampak positif terhadap pertumbuhan inklusif di Afrika, khususnya daerah pedesaan. Digital ekonomi menyediakan tool yang bervariasi untuk mendorong penurunan kemiskinan, *inequality*, dan pengangguran di Afrika. Penelitian “Human capital, innovation, and inclusive growth in sub-Saharan African Region” (Oyinlola, Adedeji, Onitekun, 2021) menyatakan bahwa perkembangan *human capital* berdampak langsung dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdampak tidak langsung melalui inovasi.

Untuk mengentaskan kemiskinan, tidak cukup hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara *absolute*, perlu bertransformasi ke arah pertumbuhan yang inklusif. Ali dan Son (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Penelitian *Measurement and Determinants of Inclusive Growth* (Khan, et.al, 2016) menyatakan bahwa kesetaraan kesempatan adalah *core* dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif menyediakan penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan pembangunan lainnya melalui rapid and sustained economic growth. Sejalan dengan *ADB's Strategy 2030*, mencita-citakan Asia dan Pasifik yang inklusif, keuntungan kawasan dan peluang dapat diakses oleh semua pihak. Tanpa perhatian dan perencanaan yang tepat, akan semakin sulit bagi pertumbuhan untuk menjangkau kaum miskin yang tetap dikucilkan oleh keadaan, tata kelola yang buruk, dan hambatan pasar lainnya.

Merujuk pada tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, tak terkecuali di Aceh, penanganan kemiskinan mestinya menjadi prioritas pembangunan. Menurut ADB (2005), masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinan karena tidak dapat mengakses *essential assets* yaitu *human capital, physical capital, natural capital, financial capital*, dan *social capital*. Penelitian ADB juga menjelaskan penyebab

kemiskinan dan penghambat upaya pengentasan kemiskinan, antara lain: manajemen ekonomi makro yang lemah, masalah ketenagakerjaan termasuk pengangguran, setengah pengangguran dan upah rendah, sektor pertanian yang berkinerja buruk dan agenda *land reform* yang belum selesai, masalah tata kelola pemerintahan termasuk korupsi, serta masalah konflik dan keamanan. Persoalan penanganan kemiskinan perlu dipahami secara menyeluruh dan perlu diketahui penyebab penghambat pengentasan kemiskinan di Aceh. Dari permasalahan yang diuraikan diatas, beberapa pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Apakah sumber permasalahan kemiskinan di Provinsi Aceh?
- b. Apa saja potensi ekonomi/*leading sector* di Provinsi Aceh yang dapat meningkatkan perekonomian?
- c. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian diatas, yaitu mengidentifikasi permasalahan kemiskinan Aceh yang diduga disebabkan oleh permasalahan tenaga kerja, ekonomi, dan sosial lainnya yang menghambat pengentasan kemiskinan, serta mengidentifikasi potensi ekonomi/*leading sector* di Aceh sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Dilanjutkan dengan simulasi pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Harapannya, dengan penelitian ini dapat memudahkan pemerintah untuk menentukan prioritas kebijakan yang tepat sesuai dengan karakteristik daerahnya dalam mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan akan meningkatkan *well-being* masyarakat (OECD, 2021).

II. Metode

Lokus dalam penelitian adalah Provinsi Aceh, fokus penelitian adalah pengurangan tingkat kemiskinan dan potensi ekonomi di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari PDRB Provinsi Aceh, tingkat kemiskinan Provinsi Aceh, tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, garis kemiskinan Provinsi Aceh, tabel Input-Output (I-O) Provinsi Aceh 2016, dan jumlah penduduk miskin Provinsi Aceh berdasarkan desil yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Februari 2022. Periode data yang digunakan adalah tahun 2019 - 2022. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bappenas. Penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis. Analisis deskriptif digunakan untuk memberi gambaran perekonomian Provinsi Aceh, kondisi kemiskinan, dan sektor unggulan Provinsi Aceh, serta permasalahan ekonomi dan sosial yang menghambat pengentasan kemiskinan. Simulasi pengurangan kemiskinan ekstrim menggunakan tabel I-O dan data jumlah penduduk miskin berdasarkan desil.

2.1. Tabel *Input-Output* Provinsi Aceh 2016

Tabel Input-Output Provinsi Aceh adalah uraian statistik dalam bentuk *matrics* yang menyajikan informasi transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam provinsi Aceh pada tahun 2016. Beberapa asumsi yang terdapat pada analisis tabel *Input-Output* adalah keseragaman yaitu setiap sektor hanya memproduksi satu jenis output dengan struktur input tunggal; kesebandingan yaitu penggunaan input suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan *outputnya*; dan asumsi penjumlahan yaitu pengaruh kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari pengaruh pada masing-masing sektor tersebut. Tabel *Input-Output* dapat memberi petunjuk mengenai sektor-sektor yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor yang peka terhadap perekonomian

suatu daerah. Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam analisis tabel *Input-Output* antara lain: rasio *input-output* tetap konstan sepanjang periode analisis sehingga asumsi semacam ini menolak adanya pengaruh perubahan teknologi atau produktivitas.

2.1.1. Angka pengganda

Angka pengganda output adalah angka yang menunjukkan seberapa besar hubungan antara permintaan akhir di suatu sektor tertentu terhadap penciptaan output di sektor tersebut. Jika suatu lapangan usaha memiliki nilai angka pengganda sebesar x , maka peningkatan permintaan akhir di sektor tersebut sebesar 1 rupiah, akan meningkatkan output di sektor tersebut sebesar x rupiah. Semakin besar nilai angka pengganda output, semakin besar pengaruh sektor tersebut terhadap perekonomian.

2.1.2. Analisis Keterkaitan ke belakang

Peningkatan output sektor tertentu akan mendorong peningkatan output sektor lainnya, melalui dua cara. Pertama, peningkatan output lapangan usaha- i akan meningkatkan permintaan input lapangan usaha- i tersebut. Input lapangan usaha- i tersebut ada yang berasal dari lapangan usaha- i sendiri, ada pula yang berasal dari lapangan usaha lain. Keterkaitan antar sektor industri yang seperti ini disebut dengan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), karena keterkaitannya bersumber dari mekanisme penggunaan input produksi.

2.1.3. Analisis Keterkaitan ke depan

Peningkatan output lapangan usaha tertentu akan mendorong peningkatan output lapangan usaha lainnya, melalui dua cara. Pertama peningkatan output lapangan usaha- i akan meningkatkan distribusi output lapangan usaha- i tersebut. Hal ini membuat lapangan usaha lain memiliki input produksi yang lebih banyak. Karena itu lapangan usaha lain akan meningkatkan pula proses produksinya, yang pada gilirannya mendistribusikan output produksi yang lebih banyak lagi. Keterkaitan antar sektor industri yang seperti ini disebut dengan keterkaitan ke depan (*forward linkage*), karena keterkaitannya bersumber dari mekanisme penggunaan *output* produksi.

2.2. Simulasi pengurangan tingkat kemiskinan

Simulasi dilakukan dengan membandingkan garis kemiskinan dengan rata-rata konsumsi perkapita penduduk kelompok desil terbawah. Pemilihan kelompok desil terbawah dengan asumsi kelompok tersebut merupakan kelompok penduduk dengan tingkat konsumsi paling rendah (kemiskinan ekstrim). Penurunan kemiskinan pada kelompok tersebut, mengasumsikan penurunan kemiskinan yang sebanding di kelompok desil di atasnya. Garis kemiskinan diproyeksikan dengan peningkatan 5,4 persen pertahun. Pemilihan pertumbuhan 5,4 persen merujuk pada nilai tengah pertumbuhan garis kemiskinan sebelum pandemic Covid-19 yang bergerak di kisaran 4,8-6 persen pertahun.

Rata-rata konsumsi perkapita penduduk desil terbawah tahun 2022 diperoleh dari Susenas Maret 2022 provinsi Aceh. Tabel 1 menunjukkan rata-rata konsumsi perkapita setiap desil di provinsi Aceh. Rata-rata konsumsi perkapita kelompok desil 1 sebesar Rp 386.167, sedangkan garis kemiskinan pada maret 2022 provinsi aceh sebesar Rp 579.227 rupiah. Dengan demikian, konsumsi rata-rata penduduk desil 1 jauh dibawah garis kemiskinan dan mengindikasikan hamper seluruh penduduk pada kelompok tersebut jatuh dalam garis kemiskinan. Dalam penelitian ini, kelompok penduduk desil 1 disebut kelompok kemiskinan ekstrim karena kelompok tersebut melakukan konsumsi jauh dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1. Rata-rata konsumsi perkapita perbulan berdasarkan kelompok Desil Provinsi Aceh 2022

Kelompok	Konsumsi per kapita (Rp/bulan)
(1)	(2)
Desil 1	386.167
Desil 2	517.451
Desil 3	606.456
Desil 4	687.685
Desil 5	786.689
Desil 6	891.866
Desil 7	1.031.488
Desil 8	1.210.384
Desil 9	1.486.172
Desil 10	2.744.930

Sumber: Hasil pengolahan data

Proyeksi rata-rata konsumsi perkapita penduduk kelompok desil terbawah menggunakan pengganda nilai tambah bruto dari tabel Input Output Aceh. Dari nilai pengganda tersebut, diperoleh tambahan nilai tambah bruto dalam satu provinsi akibat kenaikan permintaan akhir. Komponen dari nilai tambah bruto dalam suatu perekonomian, salah satunya adalah upah-gaji dan surplus usaha rumah tangga. Kedua komponen inilah yang akan menjadi *proxy* dalam menghitung peningkatan pendapatan rumah tangga. Penambahan nilai tambah bruto dalam perekonomian dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta NTB = V * X$$

Keterangan:

ΔNTB : penambahan nilai tambah bruto

V : matrik pengganda nilai tambah

X : peningkatan permintaan akhir

Simulasi peningkatan permintaan akhir dilakukan secara merata pada 52 lapangan usaha yang terdapat pada tabel *input-output* Aceh. Besarnya injeksi permintaan akhir sebesar yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, yaitu sekitar 5,8 milyar rupiah. Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 4 persen diperlukan injeksi permintaan akhir sebesar 4,2 milyar rupiah. Untuk mendapatkan nilai komponen upah-gaji dan surplus usaha rumah tangga dari penambahan nilai tambah bruto menggunakan rasio data Neraca Institusi Terintegrasi (NIT) tahun 2019, dengan asumsi tidak ada perubahan struktur perekonomian antar institusi. Besarnya rasio nilai tambah yang diterima total rumah tangga sebagai pendapatan adalah:

Δpendapatan rumah tangga

$$= \text{upah dan gaji} + \text{surplus usaha rumah tangga} + \text{lainnya}$$

$$\text{Kompensasi tenaga kerja} = 43,54\% * \Delta NTB$$

$$\text{Surplus usaha rumah tangga} = 56,14\% * \Delta NTB * 0,08$$

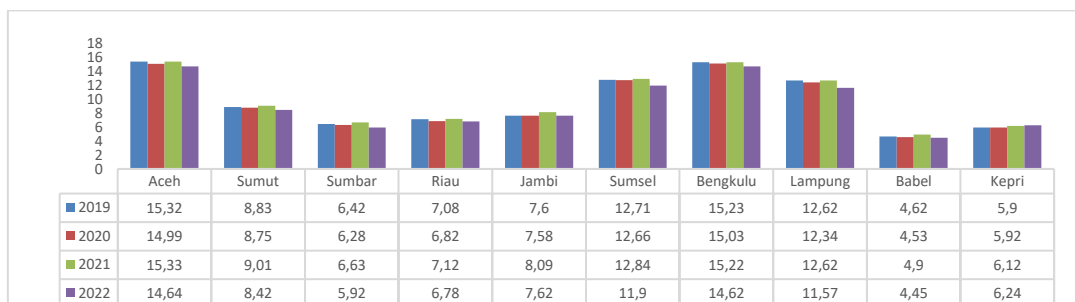
$$\text{Lainnya} = 0,33\% * \Delta NTB$$

Rasio sebesar 43,54 persen merupakan rasio komponen upah-gaji terhadap nilai tambah bruto pada total perekonomian berdasarkan Neraca Institusi Terintegrasi tahun 2019. Rasio 56,14 persen merupakan komponen surplus usaha terhadap nilai tambah bruto dalam Neraca Institusi Terintegrasi. Dari rasio 56,14 tersebut, yang merupakan surplus usaha rumah tangga hanya sebesar 8 persen. Setelah memperoleh estimasi penambahan pendapatan rumah tangga, selanjutnya dilakukan estimasi konsumsi rumah tangga. Total pendapatan rumah tangga yang dinikmati sebagai konsumsi rumah tangga, mengikuti rasio dari Neraca Institusi Terintegrasi 2019 sebesar 0,84 persen dari total tambahan pendapatan. Dari total konsumsi yang dilakukan rumah tangga, kemudian didistribusikan pada setiap kelompok desil. Pendistribusiannya menggunakan kaidah 40 persen pendapatan dinikmati oleh 20 persen kelompok teratas (desil 10 dan desil 9), 40 persen dinikmati kelompok menengah (desil 5- desil 8), sisanya sebesar 20 persen dinikmati oleh kelompok terbawah (desil 1-desil 4) (Supadi dan Nurmanaf, 2003).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Profil kemiskinan Aceh

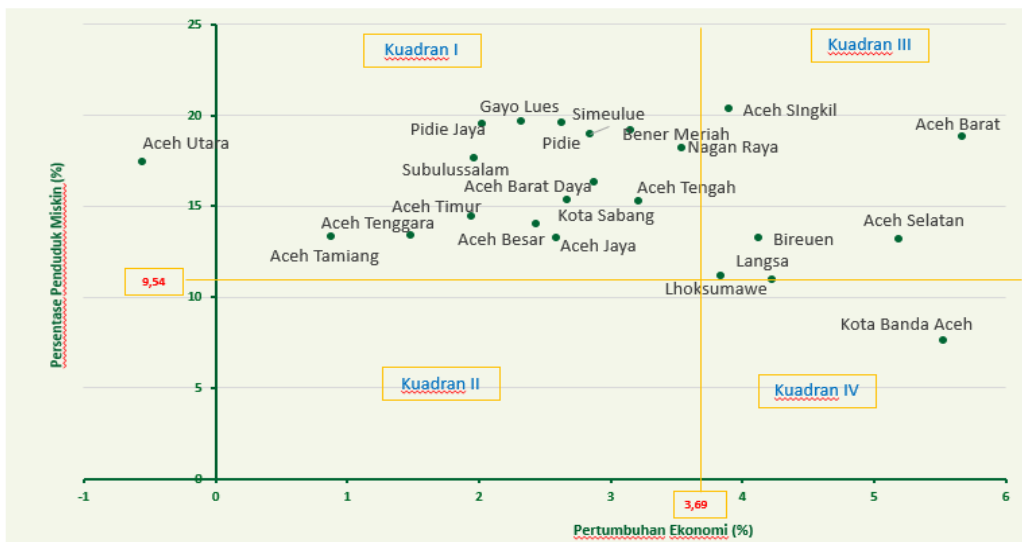
Menilik sejarah wilayah Aceh, pada tahun 2004 terjadi bencana yang menghancurkan sebagian wilayah tersebut. Dampak ekonomi dari bencana tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi Aceh yang mengalami kontraksi hingga 10,12 persen dan tingkat kemiskinan meningkat hingga 28,69 persen pada tahun 2005. Berdasarkan beberapa penelitian, dampak ekonomi dari bencana tersebut memulih dalam satu dekade (Heger dan Neumayer, 2019). Setelah satu dekade, tingkat kemiskinan daerah yang terkena bencana cenderung turut memulih, mendekati tingkat kemiskinan daerah yang tidak terkena bencana (Vidyatama, et.al. 2021). Dalam 14 tahun pemulihan pasca bencana tersebut, perekonomian Aceh mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi aceh mencapai 5,21 persen di triwulan IV 2019, sebelum pandemic Covid-19. Namun, tingkat kemiskinan di Aceh masih diatas tingkat kemiskinan nasional, bahkan paling tinggi di pulau Sumatera.



Gambar 1. Tingkat kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional, dan paling tinggi di pulau Sumatera. Tingkat kemiskinan Aceh tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota provinsi tersebut. Teori inklusivitas menyebutkan bahwa pertumbuhan yang *inklusif* dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data sebaran kemiskinan di provinsi Aceh, pertumbuhan kabupaten/kota yang tinggi ternyata tidak serta merta membawa penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Kabupaten/kota yang berada pada kuadran III gambar 2 memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibanding kuadran lainnya. Namun, enam kabupaten/kota yang berada pada kuadran III memiliki tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional (9,54 persen). Hanya kota Banda Aceh yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dengan tingkat kemiskinan yang cukup rendah. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh tidak berdampak terhadap penurunan kemiskinan (Safuridar, 2017).



Gambar 2. Sebaran kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Aceh

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

3.2. Potensi Ekonomi di Aceh

Dalam mewujudkan hasil simulasi sebelumnya, pertumbuhan ekonomi aceh minimal harus mencapai 5 persen setiap tahun hingga tahun 2023 agar tingkat kemiskinan dapat berkurang signifikan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan nilai tambah pada lapangan usaha yang tepat, yang dapat memberikan dampak cukup baik terhadap perekonomian Aceh sehingga target pertumbuhan ekonomi 5 persen dapat dicapai setiap tahun. Hasil analisis tabel *input-output* aceh menunjukkan bahwa lapangan usaha yang memiliki pengaruh terbesar dalam perekonomian Aceh berdasarkan pengganda *output*, keterkaitan kebelakang, dan keterkaitan ke depan adalah lapangan usaha industri makanan dan minuman, industri kimia farmasi dan obat tradisional, kelistrikan, dan konstruksi.

Sebagai contoh, lapangan usaha industri makanan dan minuman memiliki nilai pengganda output sebesar 1,77. Peningkatan output lapangan usaha industri makanan dan minuman sebesar 1 milyar rupiah, dapat meningkatkan output provinsi Aceh sebesar 1,77 milyar rupiah, *ceteris paribus*. Nilai keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) industri makanan dan minuman sebesar

1,258. Artinya, ketika permintaan akhir terhadap industri makanan dan minuman meningkat sebesar 1 milyar, akan meningkatkan output lapangan usaha lain yang menjadi inputnya sebesar 1,258 milyar rupiah. Sedangkan nilai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) sebesar 1,196. Artinya peningkatan permintaan akhir sektor industri makanan dan minuman sebesar 1 milyar rupiah akan meningkatkan *output* sektor lain sebesar 1,196 milyar rupiah. Lapangan usaha yang memiliki pengaruh terbesar dapat menjadi alternatif tujuan pemerintah dalam melakukan intervensi atau kebijakan dalam berinvestasi.

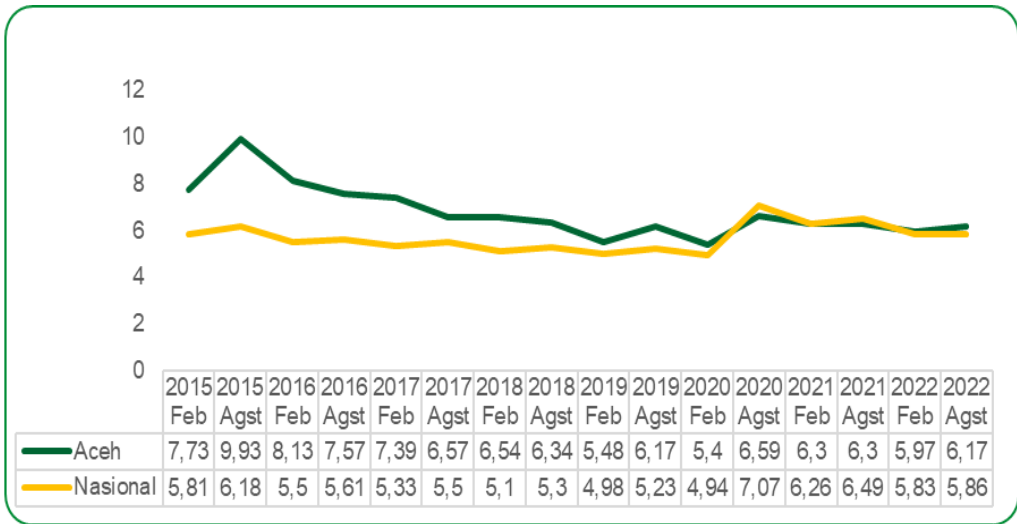
Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah apakah lapangan usaha unggulan tersebut dapat mengurangi kemiskinan? Dalam hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, suatu lapangan usaha harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran, yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga, diharapkan akan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016, rasio penyerapan tenaga kerja usaha menengah besar (UMB) pada sektor industri pengolahan lebih besar dibanding sektor lainnya. Satu unit industri pengolahan berskala UMB di Aceh dapat menyerap 104 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akibat beroperasinya suatu usaha, disebut dengan *direct effect*. Sedangkan, dengan munculnya unit usaha baru tersebut akan memunculkan efek domino bagi perekonomian wilayah sekitar, atau yang disebut *indirect effect*. Dengan demikian, pembangunan suatu industri yang tepat dapat menimbulkan efek yang cukup besar terhadap perekonomian suatu wilayah.

Aceh menyimpan beberapa potensi yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan yang saat ini tengah dihadapi. Beberapa potensi aceh antara lain (1) potensi investasi asing di Aceh; (2) Aceh sebagai tempat hubungan perdagangan; (3) Aceh sebagai ruang ekonomi yang berdikari; (4) Aceh sebagai satu kesatuan wilayah yang beraneka ragam budaya (Phelp, dkk, 2011). Potensi tersebut mendukung Aceh untuk dapat mengembangkan perekonomian wilayah melalui investasi. Peluang untuk mendapatkan investasi pun saat ini cukup terbuka bagi pemerintah aceh (Fauzi dan Jumhuri, 2021; Purbah; 2015). Tantangan yang perlu dihadapi adalah pemilihan lapangan usaha tempat menanamkan investasi. Berdasarkan analisis sebelumnya, industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha unggulan di Aceh. Industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan sektor lain. Industri pengolahan, khususnya industri makanan dan minuman juga memiliki nilai pengganda yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah Aceh dan swasta dalam menanamkan investasi. Lebih spesifik lagi, industri yang sebaiknya di bangun di aceh harus berbasis sumber daya potensi aceh untuk mempermudah perolehan bahan baku industri mengingat aceh belum bisa menjadi tujuan pasar dikarenakan jumlah penduduk yang tidak cukup banyak. Salah satu sumber daya potensi aceh adalah pertanian dan pariwisata. Struktur perekonomian aceh masih didominasi oleh pertanian perikanan dan kehutanan, khususnya tanaman perkebunan. Komoditas perkebunan unggulan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri beberapa diantaranya adalah pala, kapuk, nilam, kayu manis, kelapa, dan kelapa sawit (Zakiah, *et al.* 2015). Dengan melihat potensi industri dan produk unggulan dari Aceh, diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pembangunan perekonomian Aceh.

3.3. Kondisi Tenaga Kerja

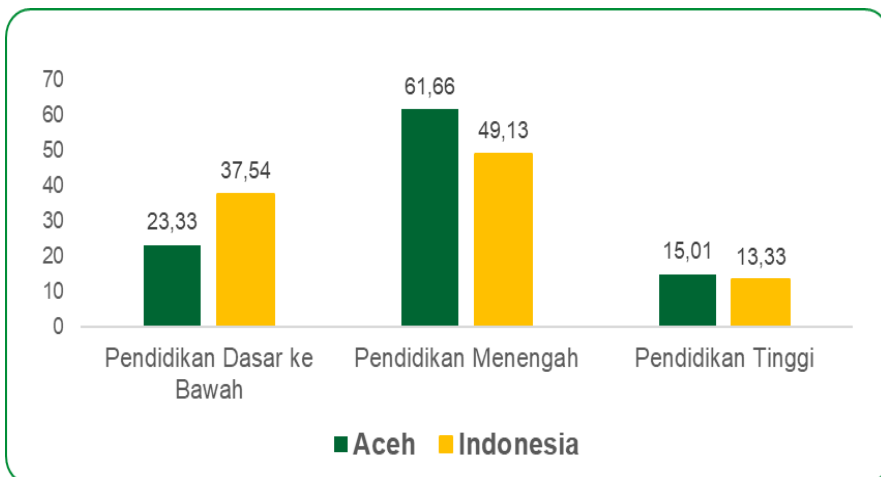
Tingkat pengangguran Aceh cenderung di atas nasional, yaitu 6,17% di tahun 2022. Pada tahun 2022, 61,66% yang menganggur di Aceh adalah mereka yang berpendidikan menengah, dan 15,01% adalah mereka yang berpendidikan tinggi. TPAK Aceh berada di bawah TPAK nasional. Pada Februari 2022, TPAK laki-laki sebesar

81,84% dan TPAK perempuan hanya 46,59%. TPAK perempuan Aceh berada di bawah TPAK perempuan secara nasional yaitu sebesar 54,27% (kondisi Feb 2022). Dari uraian diatas, terlihat bahwa partisipasi angkatan kerja di Aceh masih rendah serta kurangnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Keikutsertaan perempuan dalam tenaga kerja berpengaruh terhadap performa pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah (Heathcote, *et al.* 2017).



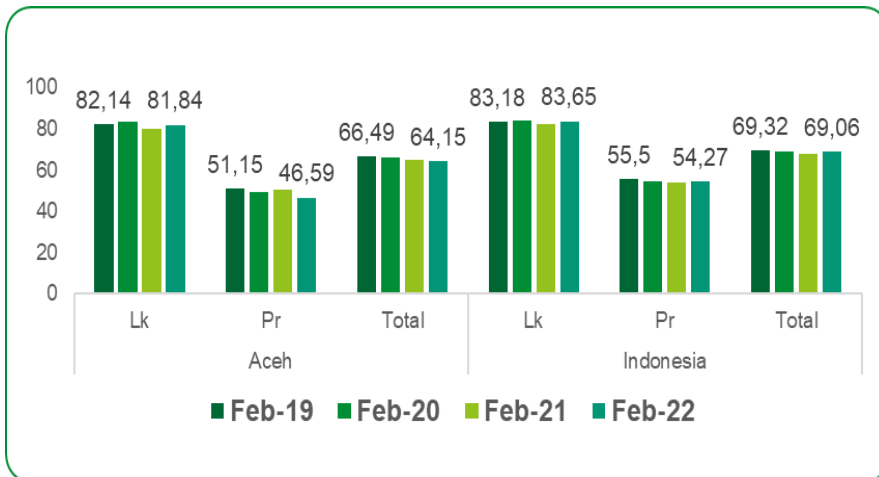
Gambar 3. Tingkat Pengangguran Aceh, 2015-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021



Gambar 4. Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan, 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

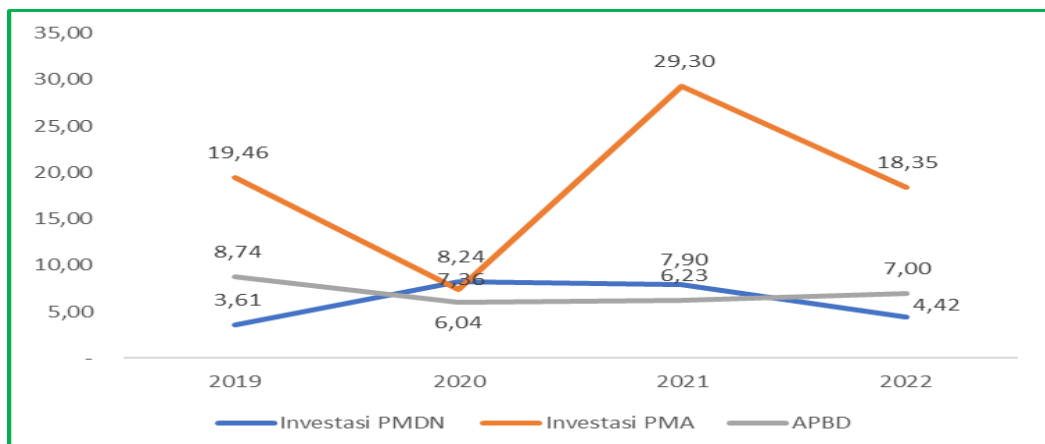


Gambar 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Gender, 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.4. Kondisi Investasi

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh, salah satunya melalui peningkatan investasi, berikut ini adalah progres investasi selama tahun 2019-2022. Berdasarkan data BKPM dan DJPK Kemenkeu, tercatat realisasi PMA dan PMDN di tahun 2022 masing-masing 18,35 triliun dan 4,42 triliun, turun dibanding tahun 2021. Dengan total investasi tersebut, Aceh menduduki peringkat 24 dari 34 provinsi se-Indonesia. Belanja modal APBD selama tahun 2019-2022 berada di kisaran 6-9 triliun. Dari segi investasi, peringkat investasi Aceh menunjukkan bahwa Aceh termasuk daerah yang kurang mendapatkan suntikan investasi melalui PMDN maupun PMA. Perlu dilakukan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menarik investor berinvestasi di Provinsi Aceh.



Gambar 6. Belanja Modal APBD dan Realisasi PMDN, PMA di Provinsi Aceh (Triliun Rp)

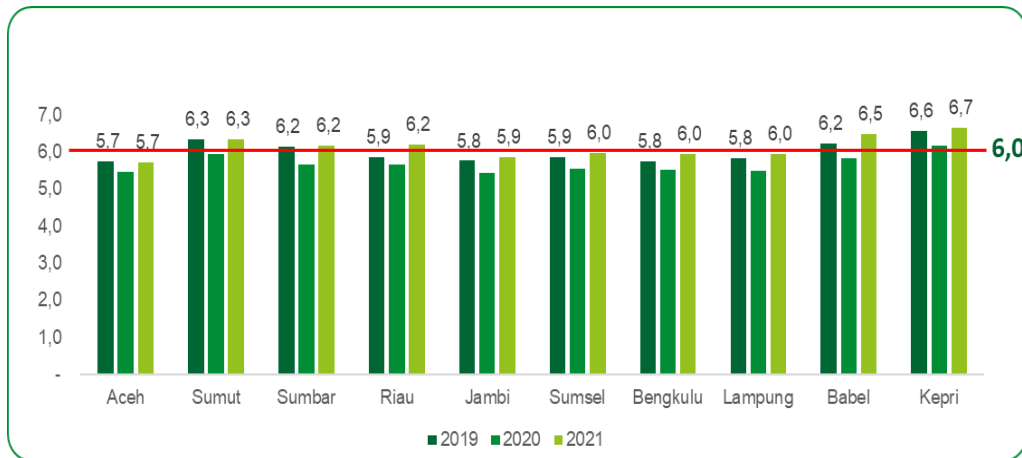
Sumber: BKPM, DJPK Kemenkeu

Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2022), ada 10 isu strategis investasi Aceh meliputi (1), Regulasi Pro Investasi, (2), Infrastruktur Konektivitas Pendukung Investasi, (3), Akses Keuangan dan Perbankan, (4), Digitalisasi Pelayanan Investasi,

(5), Pengembangan Kawasan Peruntukan Investasi, (6), Peningkatan Partisipasi Masyarakat, (7), Pengembangan SDM dan Kompetensi Tenaga Kerja, (8), Hilirisasi Industri, (9), Persepsi Investor dan Image Branding Aceh, dan (10), Peningkatan Potensi Investasi Halal dan berkelanjutan termasuk NEKA. Upaya peningkatan penanaman modal atau investasi terus dilakukan. Pemerintah Aceh melalui Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan empat Kawasan Industri Strategis yang diperuntukkan untuk kawasan investasi yaitu Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo.

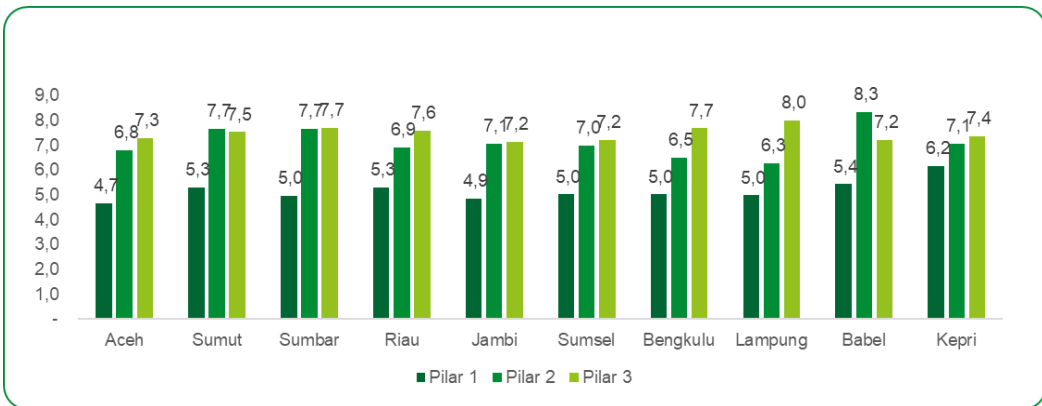
3.5. Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Aceh

Berdasarkan data Bappenas tahun 2021, Indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan indeks terendah adalah Provinsi Aceh. Walaupun, sempat terjadi penurunan *indeks* pembangunan ekonomi inklusif di tahun 2020, namun di tahun 2021 indeks inklusif menunjukkan peningkatan. Secara umum, Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian memiliki skor terendah dibanding Pilar 2 Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan, dan Pilar 3 Perluasan Akses dan Kesempatan. Walaupun termasuk dalam skala memuaskan, Indeks Pilar 1 dan Pilar 2 Provinsi Aceh termasuk terendah diantara provinsi lainnya di Sumatera (Skala: 1-3 kurang memuaskan, 4-7 memuaskan, 8-10 sangat memuaskan).



Gambar 7. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Se-Sumatera, 2019-2021

Sumber: Bappenas



Gambar 8. Indeks Pembangunan Ekonomi *Inklusif* Provinsi Se-Sumatera Berdasarkan Pilar Tahun 2021

Sumber: Bappenas

Tabel 1. Rata-rata konsumsi perkapita perbulan berdasarkan kelompok Desil Provinsi Aceh 2022

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar 1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar 2	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar 3	Pertumbuhan PDRB	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Penduduk Miskin	Gini Ratio (data diolah)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Simeulue	5,05	4,73	5,64	5,14	2,85	71,15	18,98	0,310	13,90
Aceh Singkil	4,86	4,61	6,15	4,27	3,90	62,85	20,36	0,337	14,32
Aceh Selatan	5,30	4,64	6,28	5,84	5,19	60,85	13,18	0,295	14,60
Aceh Tenggara	5,39	4,66	6,90	5,65	1,48	69,62	13,41	0,247	14,01
Aceh Timur	4,73	4,40	6,43	4,01	1,94	59,48	14,45	0,271	13,04
Aceh Tengah	5,55	4,74	6,63	6,37	3,21	76,30	15,26	0,290	14,28
Aceh Barat	5,55	4,92	6,49	6,05	5,67	60,05	18,81	0,295	14,61
Aceh Besar	5,49	4,73	6,24	6,50	2,44	61,67	14,05	0,296	14,73
Pidie	5,39	4,67	6,79	5,70	2,63	60,29	19,59	0,220	14,47
Bireuen	5,41	4,62	6,73	5,98	4,13	65,91	13,25	0,296	14,84
Aceh Utara	5,37	4,49	6,51	6,33	-0,55	58,47	17,43	0,283	14,71
Aceh Barat Daya	5,50	4,84	6,45	6,04	2,88	57,91	16,34	0,282	13,65
Gayo Lues	4,96	4,55	6,87	4,26	2,32	78,99	19,64	0,264	13,78
Aceh Tamiang	5,51	4,75	6,30	6,46	0,88	66,43	13,34	0,276	13,76
Nagan Raya	5,08	4,70	6,82	4,43	3,54	64,99	18,23	0,257	14,14
Aceh Jaya	5,05	4,72	6,52	4,47	2,59	72,59	13,23	0,312	13,99
Bener Meriah	5,16	4,75	6,66	4,73	3,15	77,53	19,16	0,255	13,47
Pidie Jaya	5,02	4,55	7,03	4,35	2,03	57,77	19,55	0,236	14,97
Kota Banda Aceh	6,32	5,72	6,39	7,64	5,53	63,00	7,61	0,347	17,80
Kota Sabang	5,25	5,00	6,61	4,61	2,67	63,71	15,32	0,293	14,13
Kota Langsa	5,74	5,28	6,20	6,27	4,23	67,04	10,96	0,340	15,63
Kota Lhokseumawe	5,86	5,40	6,23	6,51	3,84	63,91	11,16	0,296	15,21
Kota Subulussalam	4,94	4,77	6,34	4,13	1,97	63,78	17,65	0,303	14,62
ACEH	5,73	4,66	6,79	7,28	2,79	63,78	15,33	0,311	14,36

Sumber: Bappenas

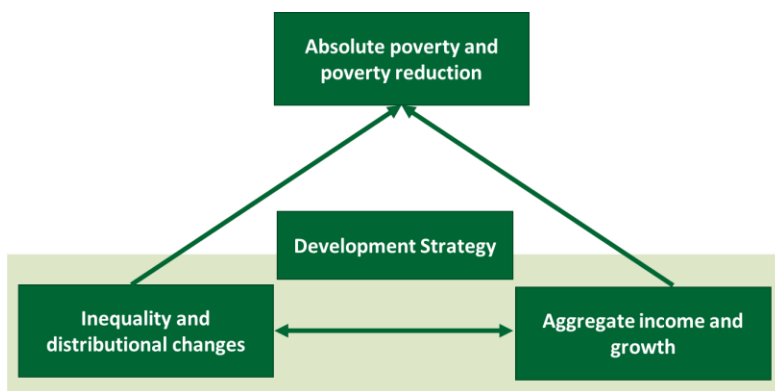
Dari indeks pembangunan ekonomi inklusif tahun 2021, terlihat mayoritas kabupaten/kota masih berada di bawah indeks provinsi. hanya ada 3 kabupaten/kota yang berada di atas indeks provinsi yaitu Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Dilihat dari pertumbuhan PDRB kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi berkisar minus 0,55-5,67 di tahun 2021. Harapan lama sekolah berkisar 13-15 tahun, hanya Kota Banda Aceh sebesar 17,8 tahun.

3.6. Tata Kelola Pemerintahan dan Strategi Penanganan Kemiskinan

Penelitian Kiram (2020) di Aceh menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang buruk akan menghambat pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan seharusnya menjadi program prioritas di Aceh. Sasaran pemberdayaan dan kebijakan yang disusun oleh pemerintah

seharusnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Penelitian tersebut menyatakan temuan dana otonomi khusus yang dikorupsi dan beberapa program yang tidak tepat sasaran. Menurut Statistik Kriminal yang diterbitkan BPS, wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak di Pulau Sumatera selama tahun 2021, Aceh berada di posisi kedua yaitu sebanyak 1.023 kejadian, setelah Provinsi Sumatera Utara di posisi pertama terbanyak yaitu sebanyak 5.396 kejadian.

Intervensi pemerintah terkait dengan tata kelola dan kebijakan juga merupakan hal yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. World Bank (2004) memperkenalkan *Poverty-Growth-Inequality Triangle*, yaitu perubahan kemiskinan merupakan fungsi dari pertumbuhan, ketimpangan dan perubahan distribusi pendapatan. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan yang mengkombinasikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Ott (2010) menyampaikan bahwa kualitas teknis pemerintah berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Helliwell, *et.al*(2018) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kesejahteraan melampaui dampak apapun yang ditimbulkan atas pendapatan atau biaya yang dikeluarkan.



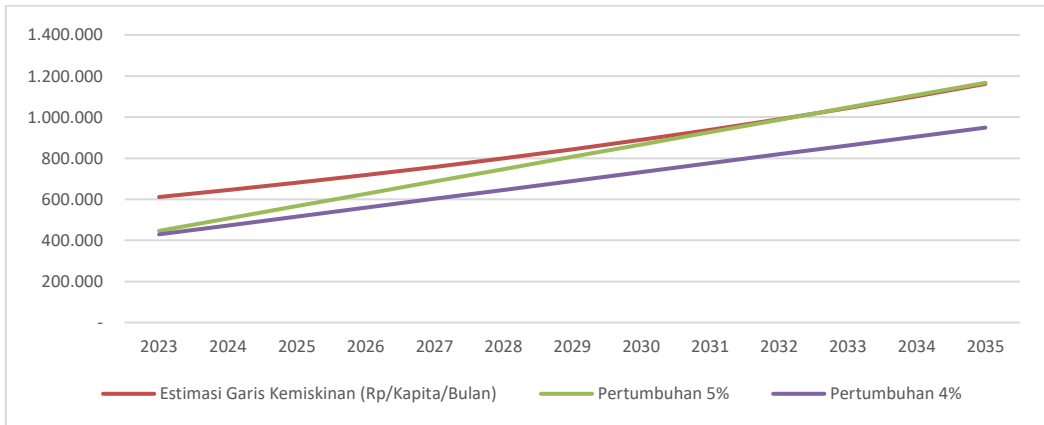
Gambar 9. *Poverty-Growth-Inequality Triangle*

Sumber: World Bank, 2004

Data Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan sekitar 60 persen penduduk Aceh bekerja di sektor industri dan jasa, dimana 98,97 persennya merupakan UMK. Jenis UMK terbanyak adalah Perdagangan, Industri pengolahan, dan Penyedia Akomodasi makan minum. Pengalaman menunjukkan sektor usaha mikro kecil (UMK) masih bisa bertahan diterpa krisis 1998 dan pandemi covid. Untuk perkembangan UMK di Aceh, pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar dalam pemberdayaan UMK, antara lain dengan mengalokasikan pagu anggaran untuk membiayai kegiatan pembinaan seperti pemanfaatan teknologi informasi serta mempermudah akses permodalan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di provinsi Aceh belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Angka kemiskinan Provinsi Aceh masih cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi belum maksimal, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia (Mantsani, *et al.* 2017). Tahun 2021 triwulan 4 pertumbuhan ekonomi aceh sebesar 2,79 persen, dibawah pertumbuhan nasional sebesar 3,69 persen. Oleh karena itu diperlukan simulasi untuk menunjukkan seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang diperlukan dan berapa lama tingkat

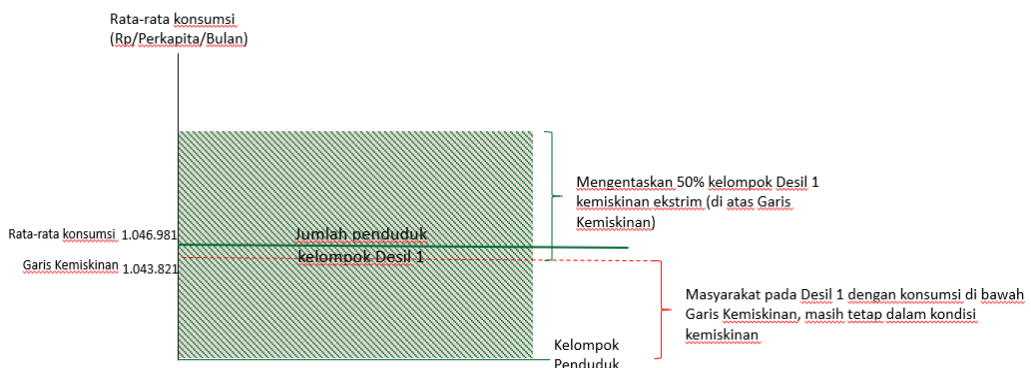
kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan. Simulasi membandingkan garis kemiskinan provinsi Aceh dengan rata-rata konsumsi perkapita penduduk kelompok desil terbawah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen di Provinsi Aceh maka tingkat kemiskinan ekstrim (desil terbawah) di provinsi tersebut belum bisa diturunkan secara signifikan.



Gambar 10. Simulasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

Sumber: hasil olahan

Simulasi kedua menggunakan pertumbuhan sebesar 5 persen per tahun. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang konsisten sebesar 5 persen setiap tahunnya diprediksi dapat menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim secara signifikan mulai tahun 2033, *ceteris paribus*. Rata-rata konsumsi perkapita kelompok desil terbawah pada tahun 2033 lebih besar dari garis kemiskinan. Gambar 10 menunjukkan bahwa pada tahun 2033 diproyeksikan rata-rata konsumsi perkapita penduduk kelompok desil terbawah sebesar Rp1.046.981,- dengan garis kemiskinan sebesar Rp1.043.821,-. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa setengah dari kelompok desil terbawah dapat dikategorikan tidak miskin mulai tahun 2033. Jika setengah dari kelompok desil terbawah dapat dikurangi jumlah penduduk miskinnya, maka kelompok desil di atasnya sudah dapat bebas dari kemiskinan. Hasil simulasi tersebut dapat dipandang sebagai masukan bagi pemerintah setempat untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi guna mengurangi kemiskinan.



Gambar 11. Ilustrasi penjelasan penurunan kemiskinan tahun 2033

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

- a. Permasalahan kemiskinan di Provinsi Aceh masih cukup tinggi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya terjadi di Provinsi Aceh. Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian memiliki skor terendah dibanding Pilar 2 dan Pilar 3. Permasalahan ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi tenaga kerja yang rendah dan kurangnya keikutsertaan wanita dalam bekerja serta investasi PMDN dan PMA yang rendah secara tidak langsung juga dapat menjadi penyebab lambatnya pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, perlu meningkatkan TPAK dan *human capital* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keikutsertaan perempuan dalam tenaga kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Berdasarkan Tabel *Input-Output* Aceh 2016, sektor unggulan Aceh adalah industri makanan dan minuman, industri kimia farmasi dan obat tradisional, kelistrikan, dan konstruksi. Struktur perekonomian Aceh didominasi sektor pertanian. Komoditi seperti pala, kapuk, nilam, kayu manis, kelapa, dan kelapa sawit dapat menjadi komoditas yang bisa dikembangkan secara hulu dan dapat dijadikan sebagai bahan baku industri unggulan yang akan dikembangkan.
- c. Untuk mengentaskan kemiskinan, perlu dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan meningkatkan kinerja sektor unggulan yang berbasis sumber daya alam sesuai dengan potensi dan karakteristik Provinsi Aceh.

4.2. Rekomendasi

Untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh, perlu mengembangkan program yang komprehensif seperti strategi penanggulangan kemiskinan TKP2K Aceh (2020). Program ini mencakup antara lain pengurangan beban pengeluaran; pemberian bantuan langsung seperti BPNT dan PKH; serta pendidikan dan kesehatan gratis. Selain itu, perlu memberdayakan masyarakat melalui pengembangan UMK dan penyaluran modal kerja, serta menciptakan iklim investasi untuk menarik investor mengembangkan industri besar di Provinsi Aceh.

Daftar Pustaka

- ADB's Strategy 2030. Achieving a Prosperous, Inclusive, Resilient, and Sustainable Asia and the Pacific. 2018
- Ali, I., & Son, H. H. 2007. Measuring Inclusive Growth. *Asian Development Review*, 11-31
- Asian Development Bank. 2005. Poverty in Phillipines: Income, Assets, and Access
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2022. Realisasi investasi Triwulan IV dan Januari-Desember Tahun 2022
- Badan Pusat Statistik. Susenas 2022
- Badan Pusat Statistik. Susenas 2021
- Badan Pusat Statistik. PDRB Aceh 2022

- Bappenas. Dashboard SDGs. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Bappenas. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. <https://inklusif.bappenas.go.id/>
- Bourguignon, F. 2004. Poverty-Growth-Inequality Triangle. World Bank
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2022. DPMPSTSP Aceh Susun Rencana Aksi Investasi Aceh 2023-2026 Mengusung Semangat Green Investment. acehprov.go.id
- Fauzi dan Jumhari. Analisis Pest Terhadap Hambatan Dan Peluang Investasi Asing Di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. 2021. Jurnal Variasi. DOI:<https://doi.org/10.51179/vrs.v13i1.527>
- Hafzrianda, Yundy., Daryantio, Arief. 2010. Model-Model Kuantitatif. Bogor:IPB Press.
- Heger, M.P., Neumayer, E. 2019. *The impact of the Indian Ocean tsunami on Aceh's long-term economic growth. Journal of Development Economics.* doi: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.008>
- Helliwell, et.al. 2018. Empirical linkages between good governance and national well-being. *Journal of Comparative Economics.* <https://doi.org/10.1016/j.jce.2018.01.004>
- Jonathan Heathcote, Kjetil Storesletten, Giovanni L. Violante. 2017. The macroeconomics of the quiet revolution: Understanding the implications of the rise in women's participation for economic growth and inequality. *Research in Economics*, Vol (71) Issue 3. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2017.03.002>
- Khan, et.al. 2016. Measurement and Determinants of Inclusive Growth. A Case Study of Pakistan. *The Pakistan Development Review.* <http://www.pide.org.pk/pdf/PDR/2016/Volume4/455-466.pdf>
- Kiram, M. 2020. Good Governance, Key Factor for Social and Economic Development in Aceh; A Case Study in Aceh Province Indonesia
- Mantsani, M., Rumodar, DAL., Syukriah, K., Sugiarto. 2017. Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun. Jakarta: Politeknik Statistika STIS
- Nchake, M.A, Shuaibu, M. 2022. Investment in ICT infrastructure and inclusive growth in Africa. *Scientific African.* <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01293>
- OECD. 2021. Compendium of OECD Well-being Indicators. <https://doi.org/10.1787/4ab9ee71-en>
- Ott, J. C. (2010). Good governance and happiness in nations: Technical quality precedes democracy and quality beats size. *Journal of Happiness Studies*, 11(3), 353–368. <https://doi.org/10.1007/s10902-009-9144-7>
- Oyinlola, Adedeji, Onitekun. 2021. Human capital, innovation, and inclusive growth in sub-Saharan African Region. *Economic Analysis and Policy.* <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.10.003>
- Phelps, N.A, Bunnell, T, Miller, M.A., Post-disaster economic development in Aceh: Neoliberalization and other economic-geographical imaginaries. 2011. *Geoforum.* doi:10.1016/j.geoforum.2011.02.006.
- Purba, M.S.M., Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing)

- Rostow, W.W. (1959). 'The Stages of Economic Growth', *The Economic History Review*, Vol. XII No. I: 1–16
- Supadi dan Achmad Rozany Nurmanaf. 2003. *Pendapatan Dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan Dan Kaitannya Dengan Tingkat Kemiskinan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4149> pada tanggal 26 Januari 2023.
- Safuridar, Safuridar. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i1.674>.
- TKP2K Aceh. 2020. Penyamaan Persepsi Kemiskinan. [TKP2K Aceh - Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan \(acehprov.go.id\)](http://tkp2k.acehprov.go.id)
- Vidyattama Y, Merdikawati N, dan Tadjoeeddin MZ. 2021. Aceh tsunami: Long-term economic recovery after the disaster. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102606>.
- Zakiah, Safrida, Santri, L. 2015. Pemetaan Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan Di Kabupaten Aceh Selatan. *Agrisep Vol (16) No. 1*.